

Tunjangan Penghasilan Pegawai RSUD Salatiga Dihapus

SALATIGA – Pegawai Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Salatiga terancam tidak mendapatkan Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) tahun ini. Penyebabnya, tim anggaran Pemkot Salatiga menghapus item anggaran senilai Rp1,9 miliar tersebut dari daftar belanja keuangan.

Tim anggaran beralasan, pemberian TPP tersebut tidak dibenarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) karena pegawai rumah sakit sudah menerima tunjangan pelayanan. Penghapusan tambahan peng-

hasilan ini dikeluarkan sejumlah pegawai RSUD Kota Salatiga. Alasannya, pendapatan mereka menjadi menurun.

“Jujur saja, saya keberatan jika TPP dihapus karena pendapatan jadi menurun. Biasanya setiap bulan saya mendapat tambahan penghasilan sekitar Rp400.000. Sekarang sudah tidak ada lagi,” kata salah seorang pegawai RSUD Kota Salatiga, Angga, 36, kemarin.

Wali Kota Salatiga Yuliyanto yang baru mengetahui penghapusan TPP tersebut, merasa ditelakung. Pasalnya, orang nomor



DOK.SINDO

YULIYANTO

satu di lingkungan Pemkot Salatiga ini tidak dilibatkan dalam pembahasan dan tidak pernah diajak komunikasi terkait penghapusan TPP tersebut. “Terus terang saya berang. Saya ditli-

kung oleh tim anggaran lantaran tidak pernah diajak komunikasi soal penghapusan TPP pegawai RSUD,” katanya kepada *KORANSINDO* kemarin.

Yuliyanto menyatakan, pihaknya akan mengupayakan agar anggaran TPP dialokasikan dan diterimakan kembali kepada pegawai RSUD Kota Salatiga. Sebab RSUD merupakan badan usaha yang menghasilkan dan memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah. “Jadi, menurut saya, wajar jika pegawai RSUD mendapat TPP,” ujarnya.

Menurut Yuliyanto, secara

keuangan Pemkot Salatiga mampu memberikan TPP bagi pegawai RSUD Kota Salatiga yang nilainya senilai Rp1,9 miliar itu. “Sebelumnya, setiap tahun anggaran TPP pegawai RSUD selalu dialokasikan. Dan mulai 2014 ini TPP dihapus. Ini sangat dikeluhkan para pegawai RSUD. Karena itu, saya minta tim anggaran mengkajinya,” katanya.

Lebih jauh Yuliyanto menyatakan, hasil kajian secepatnya akan diekspose bersama jajaran direksi RSUD Salatiga dan tim anggaran guna mengurai kendala pengalokasian anggaran

TPP pegawai RSUD. “Jika tim anggaran masih ragu untuk mengalokasikan anggaran TPP pegawai RSUD, saya minta segera konsultasi dengan BPK agar bisa mengambil keputusan yang tepat,” tandasnya.

Ketua Tim Anggaran Pemkot Salatiga Agus Rudianto saat dikonfirmasi terkait penghapusan TPP pegawai RSUD enggan memberikan komentar. “Mas yang tepat konfirmasi ke DPPKAD (Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan Aset Daerah) ya,” ucapnya.

● **angga rosa**